

Dilema *E-Democracy* di Indonesia: Menganalisis Relasi Internet, Negara, dan Masyarakat

Ahmad Alwajih

Mahasiswa S2 Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Abstract

Implementation of e-democracy in Indonesia is still problematics. This notions based on three arguments which is discussed in this article. First, e-democracy is just the facilities or the goals? Second, define e-democracy as a facilities or goals of democracy, leads to question, how this new system of democracy could be start, from structure or culture of society? Third, if Indonesians digital culture has established, then internet as democracy space could be examined, does this necessarily make the internet as a public sphere, as Jurgen Habermas theory said? This article does not aim for a practical solution, but rather try to analyze and mapping out some of the indecision in the implementation of e-democracy in Indonesia, so that the various tensions between internet relations, state , and society can be clearly explained.

Keywords: *e-democracy, internet, state, society, public sphere*

Abstrak

Implementasi *e-democracy* di Indonesia masih sangat problematis. Gagasan tersebut berdasarkan tiga argumen yang dikaji dalam artikel ini. *Pertama*, *e-democracy* sebatas sarana ataukah tujuan? *Kedua*, mendefinisikan *e-democracy* sebagai sarana atau tujuan berimplikasi pada pertanyaan, bagaimana sistem demokrasi yang baru ini harus dimulai, dari struktur ataukah kultur masyarakat? *Ketiga*, katakanlah jika kultur digital telah mapan, maka internet sebagai ruang demokrasi patut dipertanyakan, apakah lantas menjadikannya sebagai *public sphere*, seperti teori Jurgen Habermas? Artikel ini tidak bertujuan mencari solusi praktis, melainkan untuk menganalisis dan memetakan beberapa keimbangan dalam implementasi *e-democracy* di Indonesia sehingga berbagai ketegangan antara relasi internet, negara, dan masyarakat bisa terbaca secara jelas di sini

Kata kunci: *e-democracy, internet, negara, masyarakat, ruang publik*